



PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Dadan Ramdhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ddn_ramdhani@yahoo.com

Indi Zaenur Anisa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Indiz_anisa@gmail.com

Abstract

This study aims to find out The Influence of Budget Planning, Quality of Human Resources and Budget Implementation Towards Budget Absorption in Local Government of Banten Province. The object of research include the manajer of planning, financial manager and the manager technical Account Officer, used Purposive sampling. Data analysis techniques is multiple regression used SPSS 20.0. The result showed that Budget Planning, Quality of Human Resources and Budget Implementation has significant positive impact towards Budget Absorption in Local Government of Banten Provincein Local Government of Banten Province.

Keywords: Budget Planning, Quality of Human Resources, Budget Implementation, Budget Absorption

Abstrak

Penelitian ini untuk menguji Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Objek penelitian meliputi Pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran diantaranya Kasubag Perencanaan dan Program, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik analisis data adalah regresi berganda menggunakan SPSS 20.0 Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Variabel Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Kata Kunci :Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran, Penyerapan Anggaran.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, lambatnya penyerapan anggaran pada pemerintah daerah menjadi salah satu masalah klasik, yang terus terjadi setiap tahunnya. Penyerapan anggaran di awal tahun (triwulan pertama) begitu kecil tetapi mengalami peningkatan yang signifikan di akhir tahun

(triwulan keempat). Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Apabila hal ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik (sarana dan prasarana) untuk fasilitas umum, maka dampak keterlambatan ini akan mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat, disamping buruknya kualitas barang dan jasa yang disediakan dalam waktu yang terbatas (Malahayati, 2015).

Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur (*idle money*). Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi *inefisiensi* dan *inefektivitas* pengalokasian anggaran (BPKP, 2011).

Penyusunan anggaran yang dilakukan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Banten belum dapat meningkatkan kinerja. Hal ini disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Pemerintah Daerah Provinsi Banten memiliki tingkat SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). DPRD Provinsi Banten menilai rendahnya serapan anggaran diakibatkan lemahnya perencanaan dan ketidakmampuan kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan program yang menjadi tugas dan wewenangnya. Kepala OPD dinilai belum memberikan kinerja yang optimal guna mewujudkan sasaran anggaran. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten. Karena anggaran yang sudah dialokasikan harus terserap 100 persen untuk kepentingan masyarakat Banten, tentu ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Pada laporan kas daerah dimana Sisa lebih pembiayaan (Silpa) APBD 2016 sesuai laporan kas daerah per 3 Januari 2017 lebih kecil dibanding Silpa APBD 2015. Silpa APBD 2016 di angka Rp. 559 milyar, jauh menurun dari silpa tahun sebelumnya 2015 yang mencapai Rp.1 triliun (Bapeda Provinsi Banten, 2016).

Pencapaian penyerapan APBD Banten 2016 pada triwulan kedua baru mencapai 41,26 persen atau senilai Rp. 3,63 triliun dan menyisakan anggaran sebesar Rp.5,17 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp.8,81 triliun. Meski capaian total lebih baik dari serapan tahun sebelumnya di triwulan kedua sebesar 26,35 persen, pencapaian tersebut masih dibawah target penyerapan anggaran sebesar 75 persen. Untuk capaian kinerja APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2016 pada akhir tahun anggaran capaian penyerapan anggaran sudah mencapai 92,85 persen, belum mencapai target penyerapan anggaran 100 persen berarti masih ada anggaran yang belum terserap.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten?
2. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten?
3. Apakah Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten?

TINJAUAN LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Literatur

Teori Keagenan

Penyerapan anggaran dalam prespektif teori keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literature akuntansi disebut dengan teori keagenan. Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen pada organisasi sektor publik masyarakat sebagai pemilik dana (principal) dan eksekutif sebagai agent. Dalam penelitian ini teori keagenan mendukung hipotesis yang menjelaskan pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusiadan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Goal Setting Theory

Goal Setting Theory juga merupakan bagian dari teori motivasi. Teori ini menyatakan bahwa karyawan memiliki komitmen tujuan tinggi akan mempengaruhi kinerja manajerial untuk sasaran pencapaian penyerapan anggaran. Adanya tujuan individu menentukan seberapa besar usaha yang akan dilakukannya, semakin tinggi komitmen karyawan terhadap tujuannya akan mendorong karyawan tersebut untuk melakukan usaha yang lebih keras dalam mencaai tujuan tersebut. Menurut Locke dan Lathan (2002) tujuan memiliki pengaruh yang luas pada perilaku karyawan dan kinerja dalam organisasi.

Penyerapan Anggaran

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Namun hingga kini, salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah adalah besarnya penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD. Menurut Noviwijaya & Rohman (2013) penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Mengukur daya serap membutuhkan lebih dari sekedar membandingkan dana yang tersedia dan pengeluaran yang sebenarnya. Penyerapan anggaran yang akuntabel dan memenuhi prinsip *value of money* merupakan salah satu penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi ukuran kinerja pemerintah.

Meskipun penyerapan anggaran yang rendah bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus menaruh perhatian terhadap ini. Apabila hal ini terus terjadi, dapat dipastikan target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan ini berarti ada uang pemerintah daerah yang

mengangur yang seharusnya dapat di investasikan pada tempat-tempat yang lebih produktif (BPKP, 2011).

Kondisi penyerapan anggaran yang rendah dan tidak proporsional menurut Miliasih (2012) akan berimplikasi pada :

1. Lambatnya pelaksanaan kegiatan/program pemerintah dan akan berpengaruh kepada pelayanan publik.
2. Penundaan pencairan dana untuk belanja barang/jasa menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan multiplier effect dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran.
3. Penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun anggaran menyebabkan beban yang berat terhadap penyediaan uang / kas pemerintah, sehingga dapat memungkinkan terjadinya *cash mismatch*.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya terutama berpedoman pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah telah merencanakan target-target pembangunan dimasa mendatang.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan/ pekerjaan. Menurut Halim dan Kusufi (2014) mendefinisikan anggaran sebagai alat perencanaan anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut.

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran.

Anggaran sebagai alat perencanaan di gunakan untuk (Mardiasmo, 2009):

- a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatanyang telah disusun, dan
- d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Perencanaan yang anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan yang mencegah penyerapan anggaran. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, diantaranya mengenai partisipasi, akurasi data, pengesahan APBD, pendekatan dan instrumen dalam penyusunan anggaran, perencanaan dan kebutuhan serta revisi atau perubahan (Zarinah, 2016).

Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber Daya Manusia (SDM) secara makro adalah warga Negara yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa berpendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya (Badriyah, 2015).

Suharto (2012) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia sebagai kemampuan dari pegawai dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan profesionalisme dalam bekerja. Matutina (2001) Kualitas kerja mengacu kepada kualitas sumber daya manusia yang mencakup komponen-komponen berikut :

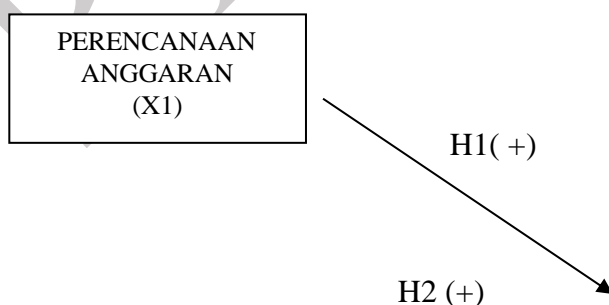
1. Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu kemampuan yang dimiliki pegawai lebih berorientasi pada intelenensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki pegawai.
2. Keterampilan (*Skill*) yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional dibidang tertentu yang dimiliki pegawai.
3. Kemampuan (*Ability*) yaitu kemampuan yang terbentuk dari jumlah kompetensi yang dimiliki seseorang karyawan (pegawai) yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

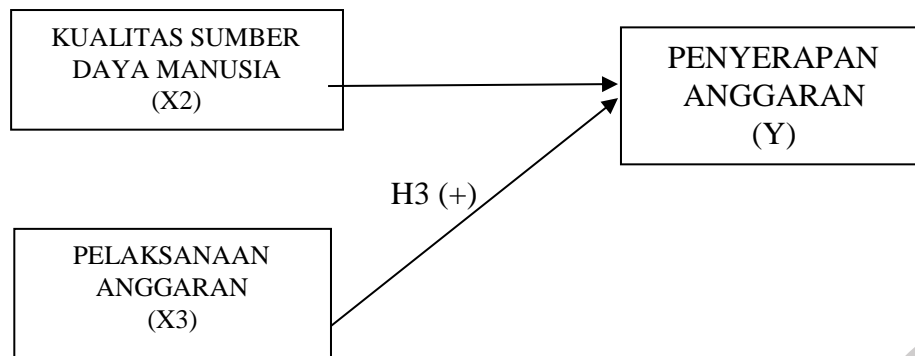
Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan (BPKP,2011). Proses pelaksanaan meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang di perlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran.

Kerangka Pemikiran





Sumber :Zarinah (2016) dan Fitriany (2015)

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran.

Dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran, memperkuat perencanaan seperti ketepatan alokasi dan penentuan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan dapat berjalan lancar. Selain itu perlu ditegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar mempertajam program dan rencana kerja dengan melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat menghindari inefisiensi dan meningkatkan fleksibilitas SKPD (Zarinah, 2016). Perencanaan anggaran yang baik akan mempermudah implementasi pelaksanaan anggaran, sehingga apabila dikaitkan dengan pengelola keuangan, hal ini akan mempengaruhi serapan anggaran.

H1 : Perencanaan Anggaran berpengaruh pada Penyerapan Anggaran

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran.

Penelitian Miliasih (2012) juga menemukan bahwa kekurangan Sumber Daya manusia yang berkualitas baik pejabat pengelola maupun staf dapat mengakibatkan terlambatnya penyerapan anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin baik pula tingkat penyerapan anggarannya.

Jika SDM kurang kompeten maka serapan anggaran kemungkinan dapat menjadi rendah. Berdasarkan teori semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu satker dalam menjalankan program dan kegiatan maka serapan anggaran akan semakin baik karena SDM nya mengerti tugas pokok dan fungsinya. Didalam pelaksanaan pengelola keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi penyerapan anggaran.

H2 : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan implementasi perencanaan anggaran yang telah di susun. Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan anggaran adalah kualitas sumber

daya manusia serta perencanaan anggaran. Adapun yang terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satker, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Ketiga hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran (Malahayati, 2015).

H3 : Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.

Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten 15 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Banten. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam proses penganggaran diantaranya kepala sub bagian perencanaan dan program, kepala sub bagian keuangan, bendahara pengeluaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

VARIABEL	Definisi	INDIKATOR	SKALA
Penyerapan Anggaran (Y)	Merupakan proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran (Noviwijaya dan Rohman, 2013)	Presentasi realisasi terhadap belanja : 1. Perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran 2. Realisasi pertriwulan 3. Konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan 4. Ketepatan waktu Jadwal penyerapan setiap bulan	Ordinal

		Sumber : Zarinah (2016)	
Perencanaan Anggaran (X1)	Merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009)	<p>Proses perencanaan anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi 2. Akurasi data 3. Pengesahan APBD 4. Pendekatan dan instrument dalam penyusunan anggaran 5. Perencanaan dan kebutuhan 6. Revisi atau perubahan <p>Sumber : Zarinah (2016)</p>	Ordinal
Kualitas Sumber Daya Manusia (X2)	Sumberdaya yang memiliki akal, perasaan, keinginan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan daya dan karya (rasio, rasa dan karsa) serta memiliki pengaruh terhadap	<p>Kemampuan yang dimiliki seseorang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan 2. Pengetahuan 3. Pengalaman 4. Keterampilan 5. Pelatihan 	Ordinal

	pencapaian tujuan organisasi (Sutrisno, 2014)	6. Pendidikan Sumber : Zarinah (2016)	
Pelaksanaan Anggaran (X3)	Merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan (BPKP, 2011)	<p>Pelaksanaan anggaran di ukur dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan SK Perbendaharaan 2. Budaya Kerja 3. Penyelesaian Administrasi 4. Jumlah pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa 5. Proses pemeriksaan dokumen kontrak 6. Penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) 7. Kapasitas pihak rekanan 8. Proses Verifikasi SPM 9. Jadwal Anggran Kas 10. Pencairan uang kepada pihak rekanan <p>Sumber : Malahayati (2015)</p>	Ordinal

Sumber : Data dikembangkan untuk penelitian ini, (2017)

METODE PENELITIAN

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah berupa statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data, dalam menganalisis digunakan SPSS (Statistical Package for social Science), yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistic baik parametik maupun non parametik dengan basis windows (Ghozali,2013). Tahapan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik (uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji normalitas), uji determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji statistik F), uji signifikan parameter individual (uji t) dan analisi regresi dengan model regresi dalam penelitian ini :

$$KAt = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Yt = Penyerapan Anggaran
- X1 = Perencanaan Anggaran
- X2 = Kualitas Sumber Daya Manusia
- X3 = Pelaksanaan Anggaran
- β_1 = Koefisien Perencanaan Anggaran
- β_2 = Koefisien Kualitas Sumber Daya Manusia
- β_3 = Koefisien Pelaksanaan Anggaran
- e = Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.154	2.121		.072	.942
Perencanaan Angg	.126	.049	.195	2.593	.011
Kualitas SDM	.387	.054	.530	7.106	.000
Pelak. Angg	.093	.038	.189	2.474	.015

a. Dependent Variable: Peny. Angg

Sumber: Hasil Output SPSS 20.0

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Perencanaan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial pada penerapan perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran menunjukkan bahwa hasil t_{hitung} diperoleh 2,593 dan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ $112-1 = 111-1 = 110$ adalah 1,982 maka $2,593 > 1,982$ hipotesis alternatif (H_a) diterima dengan tingkat signifikansi $0,011 < 0,05$ artinya secara parsial

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan (**Diterima**).

Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial pada kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran menunjukkan bahwa hasil t_{hitung} diperoleh 7,106 dan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ $112-1 = 111-1 = 110$ adalah 1,982 maka $7,106 > 1,982$ hipotesis alternatif (H_a) diterima dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya secara parsial kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan (**Diterima**).

Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial pada pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran menunjukkan bahwa hasil t_{hitung} diperoleh 2,474 dan t_{tabel} pada taraf $\alpha = 5\%$ $112-1 = 111-1 = 110$ adalah 1,982 maka $2,474 > 1,982$ hipotesis alternatif (H_a) diterima dengan tingkat signifikansi $0,015 < 0,05$ artinya secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan pelaksanaan anggaran dengan eksternal terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan (**Diterima**).

Pembahasan

Perencanaan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan indikator dalam penelitian dari perencanaan diantaranya partisipasi, akurasi data, pengesahan APBD, pendekatan dan instrumen dalam penyusunan anggaran, perencanaan dan kebutuhan serta revisi dan perubahan anggaran menunjukkan adanya keterkaitan antara perencanaan dan penyerapan. Penyerapan dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai. Jika perencanaan dilaksanakan sesuai dengan sasaran, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekwensinya terhadap sasaran. Dalam hal ini sasarannya adalah penyerapan anggaran sementara itu perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Kondisi penyerapan anggaran di Provinsi Banten dimana penyerapan anggaran pertriwulannya kurang lebih sudah mencapai 25% peningkatan penyerapan anggaran ini didukung oleh sistem perencanaan di provinsi banten sudah semakin baik dengan implikasinya mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah agar menyiapkan dokumen rencana pembangunan dengan baik dengan salah satu contoh dokumen perencanaan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK), konsisten, komperhensif dan dapat dilaksanakan, serta sekaligus untuk mewujudkan perencanaan yang bermutu.

Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa indikator kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, pelatihan dan pendidikan mendominasi implementasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa fokus dari Pemerintah Provinsi Banten dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia didasarkan pada hal-hal tersebut diatas.

Peningkatan kualitas pegawai di Provinsi Banten saat ini mulai menjadi perhatian pemerintah dengan dimplikasikan dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diberikan izin untuk melanjutkan pendidikan, memberikan beasiswa kepada pegawai dan diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan yang sesuai tugas dan jabatannya. Dengan upaya ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pegawai terutama mendukung prestasi kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan penyerapan anggaran.

Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam hal ini respondennya menyatakan bahwa indikator pernyataan dari 10 pertanyaan yang diuji pada responden mengenai internal satker, barang jasa dan proses pencairan anggaran dari hasil jawaban responden terhadap masing masing item pernyataan berbeda-beda diketahui rata rata pernyataan dari responden sebesar 4,2 % dimana indikator mengenai permasalahan internal satker lebih kepada masalah penunjukan SK perbendaharaan, budaya kerja dan penyelesaian administrasi sedangkan untuk barang jasa indikatornya lebih kepada jumlah pejabat/panitia pengadaan, proses pemeriksaan dokumen kontrak, penentuan harga perkiraan sendiri dan kapasitas pihak rekanan dan indikator mengenai pencairan anggaran lebih pada bagaimana proses verifikasi SPM, jadwal anggaran kas dan pencairan uang kepada pihak ketiga.

Pernyataan tertinggi sebesar 4.53% dalam indikator pengadaan barang dan jasa implementasinya mengenai Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dimana harga perkiraan ini diperoleh dari beberapa suplayer penyedia barang dan jasa untuk diperoleh data harga perkiraan dari setiap barang dan jasa. Artinya Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus memahami bahwa agar penyerapan anggaran dapat terlaksana dengan baik maka harus ada ketetapan dan pemberian informasi yang cukup mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan data ketetapan HPS ini harus segera di dapat pada awal tahun sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sehingga tidak adanya penumpukan pelaksanaan anggaran di akhir tahun sehingga penyerapan anggaran tercapai.

Untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik pemerintah Provinsi Banten melalui Kepada OPD pada tahun anggran memerintahkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan OPD yang di pimpinnya untuk menyusul jadwal pelaksanaan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan pekerjaan dan penarikan anggaran pada akhir tahun. Namun dalam kenyataannya seringkali jadwal pelaksanaan program dan kegiatan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Zarinah (2016) Herryanto (2012).
2. Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Fitriany (2015) dan Zarinah (2016).

3. Terdapat pengaruh Positif dan Signifikan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Malahayati (2015) dan Kuswoyo (2011).

Saran

1. Pengesahan APBD dapat berjalan sesuai rencana diharapkan peran aktif komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif lebih intens dalam meningkatkan perencanaan.
2. Pedoman-pedoman teknis dan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan anggaran harus dilengkapi agar pengetahuan bertambah dan pegawai bisa lebih memahami dan bekerja dengan lebih teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Menetapkan SK tim dan petunjuk pelaksanaan kegiatan / Petunjuk teknis sejak awal tahun anggaran sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan anggaran yang akan berjalan.

Saran Ilmiah

Menambahkan variabel lain yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran diantaranya variabel regulasi, politik dan komitmen organisasi, menambah cakupan luasnya responden dan meneliti pada organisasi lainnya selain organisasi perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, E. 2012. *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 19 No.2 Desember 2012.
- Arif, Muchlis & Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Akademia. PT. INDEKS. Jakarta.
- BPKP . 2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran* Yogyakarta : Paris Review.
- (2012) *Mencari Solusi bagi serapan yang tersumbat*, Jakarta Timur : Warta Pengawasan
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. *Perencanaan dan penganggaran Daerah Khusus Keuangan Daerah*. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Eisenhardt, K.M. 1989. *Agency theory: An Assesment and Review*, Academy of Management Review. Vol.14 No.1 : 57-74.
- Ghojali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan ke VII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, H. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian / Lembaga di Wilayah Jakarta*, Tesis. Jakarta: FEUI.

- Miliasih. R. 2012. *Analisa Keterlambatan Penyerahan Anggran Belanja Satuan Kerja Kementrian Negara Lembaga / Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Tesis, Universitas Indonesia.
- Malahayati Cut. 2015. *Pengaruh Kapasitas SDM, Perencanaan Anggran dan Pelaksanaan Anggran terhadap Serapan Anggaran SKPD Pemkot Banda Aceh*. Tesis. Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Mardiasmo, Prof, Mba, Ak. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Noviwijaya, A dan Ananda Rohman. 2013. *Pengaruh Keragaman Gender dan Usia pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup pembayaran KPPN Semarang I)*. Diponegoro Jurnal Accounting. Vol 2(3):1-10.
- Nur Fitriany, Georgius N M, Suwarti Titik, 2015. *Exploring the factor that impact the accumulation of budget absorption in the end of the fiscal year ; a case study in pekalongan city of central java Indonesia 2015*. South East Asia Journal Contemporary Business, Ekonomic Vol.7
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang *Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah*.
- Sutrisno Edi, Prof, Dr. H. M. Si. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet. 6. Prenada Media Group.
- Zarinah Monik, Dr. Darwanis, dan Dr. Abdullah, S. 2016. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas SDM terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Kab Aceh Utara*. Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. pp.90-97.

RETRICTED